

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Mojoanyar merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Mojoanyar yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Mojoanyar adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Mojoanyar Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Mojoanyar yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Mojoanyar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Penmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2022;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Perbup No. 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2022;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Mojoanyar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Mojoanyar ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojoanyar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Mojoanyar pada tahun 2021 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Realisasi belanja pada Kecamatan Mojoanyar Tahun 2021

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | | SISA |
|----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | (Rp) | % | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.163.065.378,00 | 2.501.955.719,00 | 94,99% | 661.109.659,00 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.000.000,00 | 1.986.600,00 | 99,33% | 13.400,00 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.000.000,00 | 989.400,00 | 98,94% | 10.600,00 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.000.000,00 | 997.200,00 | 99,72% | 2.800,00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.561.535.602,00 | 1.917.962.793,00 | 87,38% | 643.572.809,00 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.551.535.602,00 | 1.907.963.693,00 | 74,78% | 643.571.909,00 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10.000.000,00 | 9.999.100,00 | 99,99% | 900,00 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 11.000.000,00 | 9.991.100,00 | 90,83% | 1.008.900,00 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 11.000.000,00 | 9.991.100,00 | 90,83% | 1.008.900,00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 355.500.000,00 | 294.437.620,00 | 99,37% | 8.141.930,00 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 13.000.000,00 | 12.985.100,00 | 99,89% | 14.900,00 |
| 1 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 240.900.000,00 | 232.854.810,00 | 96,66% | 8.045.190,00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10.000.000,00 | 9.997.810,00 | 99,98% | 2.190,00 |
| | Penyediaan Bahan/Material | 29.600.000,00 | 29.520.350,00 | 99,73% | 79.650,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 75.000.000,00 | 68.972.000,00 | 91,96% | 6.028.000,00 |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 75.000.000,00 | 68.972.000,00 | 91,96% | 6.028.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83.009.776,00 | 80.821.576,00 | 96,35 | 2.188.200,00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.029.776,00 | 27.841.778,00 | 92,71% | 2.187.998,00 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 52.980.000,00 | 52.979.798,00 | 100,00% | 202,00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 75.200.000,00 | 74.863.580,00 | 99,72% | 156.420,00 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | 30.000.000,00 | 29.969.700,00 | 99,90% | 30.300,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 30.020.000,00 | 29.990.180,00 | 99,90% | 29.820,00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000,00 | 14.903.700,00 | 99,36% | 96.300,00 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 40.000.000,00 | 33.854.100,00 | 99,51% | 145.900,00 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 40.000.000,00 | 33.854.100,00 | 99,51% | 145.900,00 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 10.000.000,00 | 9.936.100,00 | 99,36% | 63.900,00 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 24.000.000,00 | 23.918.000,00 | 99,66% | 82.000,00 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 80.000.000,00 | 78.836.500,00 | 98,52% | 1.163.500,00 |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 80.000.000,00 | 78.836.500,00 | 98,52% | 1.163.500,00 |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 45.000.000,00 | 44.440.000,00 | 98,76% | 560.000,00 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 35.000.000,00 | 34.396.500,00 | 98,28% | 603.500,00 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 57.900.000,00 | 56.017.400,00 | 94,16% | 1.882.600,00 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 57.900.000,00 | 56.017.400,00 | 94,16% | 1.882.600,00 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 42.000.000,00 | 41.960.700,00 | 99,91% | 39.300,00 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15.900.000,00 | 14.056.700,00 | 88,41% | 1.843.300,00 |
| 5 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 42.500.000,00 | 42.197.100,00 | 98,80% | 302.900,00 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 42.500.000,00 | 42.197.100,00 | 98,80% | 302.900,00 |
| | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 7.500.000,00 | 7.486.000,00 | 99,81% | 14.000,00 |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 11.250.000,00 | 11.215.800,00 | 99,70% | 34.200,00 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 3.750.000,00 | 3.738.300,00 | 99,69% | 11.700,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 10.000.000,00 | 9.757.000,00 | 97,57% | 243.000,00 |
| Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00% | 0,00 |
| JUMLAH | 3.377.465.378,00 | 2.712.860.819,00 | 80,32% | 664.604.559,00 |

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojoanyar

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan | 81% | n/a | n/a | n/a | n/a | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu | 13 dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | | | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun | 7 Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | | | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun | 6 Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | | | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu | 33 laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | | | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan | 5 laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | | | |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian | Jumlah pakaian dinas | 27 stel | 27 stel | 27 stel | 27 stel | 27 stel | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | Perangkat Daerah | PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi | 27 stel | 27 stel | 27 stel | 27 stel | 27 stel | | | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket | 3 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll. | 1 paket | 3 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan bahan Logistik Kantor | Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor | 12 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, | 1 paket | 3 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | | amplop, kop, lembar disposisi | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah waktu pemenuhan bahan/material | 12 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas | 12 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor | 100% | 100 % | | | | | | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan | 1 orang | 3 orang | 1 orang | 1 orang | 1 orang | | | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 100 % | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | | | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | | | |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik | 1 paket | 3 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| 7.01.02 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | | | |
| 7.01.02.2.04 | | Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | | | |
| 7.01.02.2.04.01 | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 975 pelayanan | 975 pelayanan | 975 pelayanan | 975 pelayanan | 975 pelayanan | | | |
| 7.01.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 15 pelayanan | 15 pelayanan | 15 pelayanan | 15 pelayanan | 15 pelayanan | | | |
| | | Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 960 pelayanan | 960 pelayanan | 960 pelayanan | 960 pelayanan | 960 pelayanan | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | | | |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | 12 fasilitasi | 24 fasilitasi | 12 fasilitasi | 12 fasilitasi | 12 fasilitasi | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 fasilitasi | 12 fasilitasi | 12 fasilitasi | 12 fasilitasi | | | | |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | n/a | 4 fasilitasi | n/a | n/a | | | | |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | n/a | 4 fasilitasi | n/a | n/a | | | | |
| 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | n/a | 4 fasilitasi | n/a | n/a | | | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capaian indikator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Mojoanyar

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | |
|-----|--|--|---------------|--|
| | | | TUJUAN | SASARAN |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah | IKM Kecamatan | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah |
| | | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | | IKM Kecamatan |

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan

Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojoanyar
Kabupaten Mojokerto

| NO | Indikator | SPM/ Standart Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2022 (n-2) | Tahun 2023 (n-1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) | Tahun 2021 (n-2) | Tahun 2022 (n-1) | Tahun 2023 (n) | Tahun 2024 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nilai IKM | | | 81 | 82 | 83 | 84 | 82 | 82 | 83 | 83 | Baik |
| 2 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | | | 81 | 82 | 83 | 84 | 82 | 82 | 83 | 83 | Baik |
| 3 | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | | 63 | 64 | 65 | 66 | 76 | 78 | 80 | 80 | Baik |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Mojoanyar diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Mojoanyar

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Mojoanyar bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Mojoanyar yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Mojoanyar;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Mojoanyar namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Mojoanyar yang heterogen maka ini merupakan

peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Mojoanyar untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2022-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

**Tabel 2.6 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto**

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|----------------|--|----------------|--------------------------|--|----------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Mojoanyar | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 78 | Rp. 2.715.690.776,00 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Mojoanyar | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 78 | Rp.2.850.697.026,00 | |
| | | | | | | | | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | 2 inovasi | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | Presentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target | 82% | Rp15,000,000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target | 82% | Rp14,500,000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dapat Tersusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku | 7 Dokumen | Rp2,000,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Rp2,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Rp1,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Rp1,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Rp1,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Rp1,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil | 1 Dokumen | Rp2,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil | 1 Dokumen | Rp1,500,000 | |

**Tabel 2.6 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto**

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|-----------------------|--|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--|------------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Rp2,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Rp2,000,000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Dapat Tersusun | 20 Laporan | Rp7,000,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 laporan | Rp7,000,000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | 82% | Rp2,175,571,000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | Prosentase Realisasi Anggaran PD yang dapat tercapai | 82% | Rp2,068.036,000 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 28 dokumen | Rp2.165.571.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Mojoanyar | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang / Bulan | Rp2.068.036.000 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Mojoanyar | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan | 30 dokumen | Rp10,000,000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 43 Dokumen | Rp227.210.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan | 82% | Rp. 230.050.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan | 82% | Rp. 2.068.036,000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi | Kec. Mojoanyar | Jumlah Jenis Komponen | 1 paket | Rp. 15.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi | Kec. Mojoanyar | Jumlah Paket Komponen Instalasi | 1 Paket | Rp. 15.580.000 | |

**Tabel 2.6 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto**

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|--|----------------|---|----------------|--------------------------|--|----------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Mojoanyar | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | Rp. 86.550.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Mojoanyar | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Rp. 90.622.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Mojoanyar | Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | Rp. 45.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Mojoanyar | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Rp. 36.610.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Kertas Kop, Lembar Disposisi, dan Foto copy | 1 paket | Rp. 15.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Rp. 14.800.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket | Rp. 3.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | Rp. 3.060.000 | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Kec. Mojoanyar | Jumlah Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Tinta, Ballpoint, Map, dll | 1 paket | Rp. 30.000.000 | Penyediaan Bahan/Material | Kec. Mojoanyar | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | Rp. 29.538.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Mojoanyar | Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | Rp. 35.500.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Mojoanyar | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Rp. 35.500.000 | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Pengadaan Barang Milik | 2 unit | Rp. 70.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Kec. Mojoanyar | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang | 80% | Rp. 37.000.000 | |

**Tabel 2.6 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto**

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------------------|--|----------------|--------------------------|--|-----------------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pemerintah Daerah | | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | Pemerintah Daerah | | dapat dicukupi | | | |
| | Pengadaan Mebel | Kec. Mojoanyar | Jumlah Paket Mebel yang telah disediakan | Paket | Rp0 | Pengadaan Mebel | Kec. Mojoanyar | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | Rp0 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Mojoanyar | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan | 82% | Rp. 86.111.026 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Mojoanyar | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan | 82% | Rp. 99.768.026 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Mojoanyar | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | Rp. 33.131.026 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Mojoanyar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Rp. 34.488.026 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Mojoanyar | Jumlah Tenaga Kerja Pelayanan Umum Kantor sesuai Kebutuhan | 3 orang | Rp. 52.980.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Mojoanyar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Rp. 65.850.000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Mojoanyar | Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | 82% | Rp. 98.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Mojoanyar | Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik | 82% | Rp.107.183.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dilakukan Penyediaan BBM, Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Rutin Lainnya | 2 unit | Rp. 32.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 unit | Rp. 45.027.000 | |

**Tabel 2.6 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto**

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | dan Pajak Kendaraan | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Mojoanyar | Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan Berfungsi dengan Baik | 3 unit | Rp. 46.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Mojoanyar | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 unit | Rp. 47.946.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Mojoanyar | Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 1 paket | Rp. 20.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Mojoanyar | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | Rp. 14.210.000 | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kec. Mojoanyar | Presentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan | 82% | Rp. 40.000.000 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kec. Mojoanyar | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | 82% | Rp. 40.000.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Mojoanyar | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan | 975 pelayanan | Rp. 40.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Mojoanyar | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 975 pelayanan | Rp. 40.000.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan | 975 pelayanan | Rp. 40.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 30 Laporan | Rp. 40.000.000 | |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Mojoanyar | Presentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti | 82% | Rp. 285.000.000 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Mojoanyar | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan | 82% | Rp. 294.000.000 | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan | 49 fasilitasi | Rp. 285.000.000 | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan | Kec. Mojoanyar | Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan | 23 Dokumen | Rp. 294.000.000 | |

**Tabel 2.6 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto**

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|----------------|--|----------------|--------------------------|--|----------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Pengawasan Pemerintahan Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat | | | dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat | | | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Mojoanyar | Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Fasilitasi | Rp. 50.000.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 8 Dokumen | Rp. 50.000.000 | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Mojoanyar | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 12 Fasilitasi | Rp. 50.000.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 5 Dokumen | Rp. 50.000.000 | |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Mojoanyar | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 8 Fasilitasi | Rp. 65.000.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5 Dokumen | Rp. 74.000.000 | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 12 Fasilitasi | Rp. 120.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Mojoanyar | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 6 Dokumen | Rp. 120.000.000 | |
| | | | | | Rp. 3.040.690.776 | | | | | Rp. 2.850.697.026 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Mojoanyar melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Mojosari secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Mojokerto

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|--|--------|---|--------------------|---------|
| 1 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Desa | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 paket | Sapi |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mojoanyar ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2026. Sasaran Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan;
2. Terwujudnya pelayanan public yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto pada 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|-----|--|---|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan public | | IKM | 81 | 81 | 82 | 83 | 85 |
| | | Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan | Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan | 81 | 81 | 82 | 83 | 85 |
| | | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | IKM Pelayanan Kecamatan | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mojoanyar Tahun 2023 mengacu pada Tujuan Kecamatan Mojoanyar yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojoanyar untuk 5

tahun mendatang yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik.**

Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojoanyar**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | | | | | |
| | Bidang Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | 78 | Rp.2.850.697.026,00 | APBD Kab. | | 79 | Rp. 2.757.896.000 |
| | | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | Kec. Mojoanyar | 2 inovasi | | | | 2 inovasi | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target | Kec. Mojoanyar | 82% | Rp14,500,000 | APBD Kab. | | 83% | Rp. 16.150.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | 2 Dokumen | Rp2,000,000 | APBD Kab. | | 2 Dokumen | Rp. 2.500,000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Mojoanyar | 1 Dokumen | Rp1,000,000 | APBD Kab. | | 1 Dokumen | Rp. 1.050.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Mojoanyar | 1 Dokumen | Rp1,000,000 | APBD Kab. | | 1 Dokumen | Rp. 1.050,000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kec. Mojoanyar | 1 Dokumen | Rp1,500,000 | APBD Kab. | | 1 Dokumen | Rp. 2.100.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kec. Mojoanyar | 1 Dokumen | Rp.2.850.697.026,00 | APBD Kab. | | 1 Dokumen | Rp. 2.100.000 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | 20 laporan | | APBD Kab. | | 20 laporan | Rp. 7.350.000 |

**Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojoanyar**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|--|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase Realisasi Anggaran PD yang dapat tercapai | Kec. Mojoanyar | 82% | Rp2,175,571,000 | APBD Kab. | | 83% | Rp. 2.176.071.000 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Mojoanyar | 19 Orang / Bulan | Rp. 2.165.571.000 | APBD Kab. | | 19 Orang / Bulan | Rp. 2.165.571.000 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Mojoanyar | 43 Dokumen | Rp10,000,000 | APBD Kab. | | 43 Dokumen | Rp. 10.500.000 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IP ASN Perangkat Daerah | Kec. Mojoanyar | 61 | Rp.40.958.750 | APBD Kab. | | 72 | Rp. 50.000.000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kec. Mojoanyar | 2 paket | Rp. 20.958.750 | APBD Kab. | | 1 paket | Rp. 25.000.000 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kec. Mojoanyar | 30 orang | Rp. 20.000.000 | APBD Kab. | | 30 orang | Rp. 25.000.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan | Kec. Mojoanyar | 82% | Rp. 230.050.000 | APBD Kab. | | 83% | Rp. 250.675.000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kec. Mojoanyar | 1 Paket | Rp. 15.000.000 | APBD Kab. | | 1 Paket | Rp. 17.000.000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kec. Mojoanyar | 5 Paket | Rp. 86.550.000 | APBD Kab. | | 7 Paket | Rp. 90.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kec. Mojoanyar | 12 Paket | Rp. 45.000.000 | APBD Kab. | | 12 Paket | Rp. 50.000.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kec. Mojoanyar | 2 Paket | Rp. 15.000.000 | APBD Kab. | | 2 Paket | Rp. 17.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Bahan | Kec. Mojoanyar | 3 | Rp. 3.000.000 | APBD | | 3 | Rp. 3.675.000 |

**Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojoanyar**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|--|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Perundang-Undangan | Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | Dokumen | | Kab. | | Dokumen | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Kec. Mojoanyar | 1 Paket | Rp. 30.000.000 | APBD Kab. | | 1 Paket | Rp. 35.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Mojoanyar | 12 Laporan | Rp. 35.500.000 | APBD Kab. | | 12 Laporan | Rp. 38.000.000 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi | Kec. Mojoanyar | 80% | Rp. 70.000.000 | APBD Kab. | | 100% | Rp. 30.000.000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional pendukung tugas sesuai kebutuhan | Kec. Mojoanyar | 2 Unit | Rp. 70.000.000 | APBD Kab. | | - | Rp0 |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kec. Mojoanyar | Paket | Rp0 | APBD Kab. | | 1 Paket | Rp.30.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan | Kec. Mojoanyar | 82% | Rp. 86.111.026 | APBD Kab. | | 83% | Rp. 105.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kec. Mojoanyar | 12 Laporan | Rp. 33.131.026 | APBD Kab. | | 12 Laporan | Rp. 40.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kec. Mojoanyar | 12 Laporan | Rp. 52.980.000 | APBD Kab. | | 12 Laporan | Rp. 65.000.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik | Kec. Mojoanyar | 82% | Rp. 98.000.000 | APBD Kab. | | 83% | Rp. 130.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau | Kec. Mojoanyar | 2 unit | Rp. 32.000.000 | APBD Kab. | | 2 unit | Rp. 40.000.000 |

**Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojoanyar**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kec. Mojoanyar | 3 unit | Rp. 46.000.000 | APBD Kab. | | 3 unit | Rp. 65.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kec. Mojoanyar | 10 Unit | Rp. 20.000.000 | APBD Kab. | | 10 Unit | Rp. 25.000.000 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | Kec. Mojoanyar | 82% | Rp. 40.000.000 | APBD Kab. | | 83% | Rp. 42.000.000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | Kec. Mojoanyar | 975 pelayanan | Rp. 40.000.000 | APBD Kab. | | 550 pelayanan | Rp. 42.000.000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Kec. Mojoanyar | 30 Laporan | Rp. 40.000.000 | APBD Kab. | | 30 Laporan | Rp. 42.000.000 |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan | Kec. Mojoanyar | 82% | Rp. 285.000.000 | APBD Kab. | | 83% | Rp. 299.250.000 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, | Kec. Mojoanyar | 23 Dokumen | Rp. 285.000.000 | APBD Kab. | | 23 Dokumen | Rp. 299.250.000 |

**Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojoanyar**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|--|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat | | | | | | | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Mojoanyar | 8 Dokumen | Rp. 50.000.000 | APBD Kab. | | 8 Dokumen | Rp. 52.500.000 |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Mojoanyar | 5 Dokumen | Rp. 50.000.000 | APBD Kab. | | 5 Dokumen | Rp. 52.500.000 |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Mojoanyar | 5 Dokumen | Rp. 65.000.000 | APBD Kab. | | 5 Dokumen | Rp. 68.250.000 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Mojoanyar | 6 Dokumen | Rp. 120.000.000 | APBD Kab. | | 6 Dokumen | Rp.126.000.000 |
| | TOTAL | | | | Rp. 3.040.690.776 | | | | Rp. 3.099.146.000 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO

| No | KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | UP | B/L | INDIKATOR KINERJA | | | LOKAS I | APBD KAB Rp. | APBD PROV | | USULAN APBN | | |
|----|-----------------|--|----|-----|--|---------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----|------------------|
| | | | | | OUTPUT | OUTCOME | TARGE T | | | SKPD Terkait | Pagu (Rp) | KL | Rp. | D/T B/ DAK |
| 1 | 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | L | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | 78 | Kec. Mojoanyar | Rp. 2.715.690.776,00 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | | | B | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | | 2 inovasi | | | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | L | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target | | 82% | Kec. Mojoanyar | Rp15,000,000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | L | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp2,000,000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD | | B | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil | | 1 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp1,000,000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | B | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 1 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp1,000,000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | B | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil | | 1 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp2,000,000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | | B | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 1 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp2,000,000 | - | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|------------------|----------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | L | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 20 laporan | Kec. Mojoanyar | Rp7,000,000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | L | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah | | 82% | Kec. Mojoanyar | Rp2,175,571,000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | L | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 19 Orang / Bulan | Kec. Mojoanyar | Rp. 2.165.571.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | L | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 43 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp10,000,000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | L | IP ASN Perangkat Daerah | | 61 | Kec. Mojoanyar | Rp.40.958.750 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | L | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut | | 2 paket | Kec. Mojoanyar | Rp. 20.958.750 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 30 orang | | Rp. 20.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | L | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan | | 82% | Kec. Mojoanyar | Rp. 230.050.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | L | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 1 Paket | Kec. Mojoanyar | Rp. 15.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | L | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 5 Paket | Kec. Mojoanyar | Rp. 86.550.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan bahan Logistik Kantor | | L | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 12 Paket | Kec. Mojoanyar | Rp. 45.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | L | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | | 2 Paket | Kec. Mojoanyar | Rp. 15.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | L | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan | | 3 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp. 3.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | | L | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | 1 Paket | Kec. Mojoanyar | Rp. 30.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | L | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 12 laporan | Kec. Mojoanyar | Rp. 35.500.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi | | 80% | Kec. Mojoanyar | Rp. 70.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | 2 Unit | Kec. Mojoanyar | Rp. 70.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | Paket | Kec. Mojoanyar | Rp0 | | | | | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | L | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | | 82% | Kec. Mojoanyar | Rp. 86.111.026 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | L | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 Laporan | | Rp. 33.131.026 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | L | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | | 12 Laporan | Kec. Mojoanyar | Rp. 52.980.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | L | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | | 82% | Kec. Mojoanyar | Rp. 98.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | L | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional pendukung tugas sesuai kebutuhan | | 2 unit | Kec. Mojoanyar | Rp. 32.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | L | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | 3 unit | Kec. Mojoanyar | Rp. 46.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | L | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 10 Unit | Kec. Mojoanyar | Rp. 20.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | L | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | | 82% | Kec. Mojoanyar | Rp. 40.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|---|--|---------------|----------------|--------------------------|---|---|---|---|---|
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | L | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | | 975 pelayanan | Kec. Mojoanyar | Rp. 40.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | L | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | | 30 Laporan | Kec. Mojoanyar | Rp. 40.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | L | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti | | 82% | Kec. Mojoanyar | Rp. 285.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | L | Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat | | 23 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp. 285.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | L | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | 8 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp. 50.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | L | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | 5 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp. 50.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | L | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 5 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp. 65.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | L | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | 6 Dokumen | Kec. Mojoanyar | Rp. 120.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | JUMLAH | | | | Rp. 3.040.690.776 | | | | | |

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Mojoanyar merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Mojoanyar selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2023, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Kecamatan Mojoanyar ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Mojokerto, 24 Januari 2022

**CAMAT MOJOANYAR**

Drs. MOKH. MALIK, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196609141995031004

RENJA
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOANYAR
TAHUN 2023
